

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	news.detik.com
Media Cetak	

Rencana Ubah e–Budgeting DKI Disorot KPK, Anies: Kita Upgrading

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak mengubah sistem anggaran digital DKI agar lebih 'smart'. Anies pun memastikan perubahan sistem itu bisa meminimalisir adanya kesalahan anggaran.

Awalnya Anies menjelaskan tujuannya ingin mengubah sistem anggaran itu untuk memaksa semua pihak agar berperilaku jujur dan rajin. Hal itu menurutnya dapat meminimalisir kesalahan dalam rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading, agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan (anggaran) lagi," kata Anies di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Menurutnya, sistem anggaran di Pemprov DKI Jakarta saat ini bebas input, sehingga jika ada kesalahan di anggaran tidak diketahui penyebabnya.

"Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu–lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan, nggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya.

Namun, Anies memastikan jika sistem anggaran itu sudah diubah menjadi lebih 'smart', Pemprov DKI akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan anggaran. Ia juga mengatakan sistem anggaran itu akan segera diluncurkan.

Ia pun meminta agar masyarakat bersikap bijak dengan adanya polemik anggaran DKI saat ini. Ia meminta masyarakat tak meramalkan kesalahan anggaran itu.

"Dan kita mengetahui ini sejak tahun lalu, tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramalkan, insya Allah akan segera beres," ucapnya.

Seperti diketahui, – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons soal polemik sistem anggaran digital milik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai Gubernur Anies Baswedan tidak smart. Ia mempersilakan Anies untuk meningkatkan kualitas sistem e–budgeting Pemprov DKI, tapi jangan menghapusnya.

"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e–budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e–budgeting dan kembali ke cara manual. @KPK_RI," kata Syarif melalui Twitter–nya, @LaodeMSyarif, seperti dilihat detikcom, Sabtu